

Nama: Anggun Lestari

NPM : 2512120028

MK : Akuntansi Sektor Publik

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti

1. Diskusikan prospek dan permasalahan dalam pengaplikasian konsep Balanced Scorecard pada organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah!

Jawaban:

1) Prospek Penerapan Balanced Scorecard di Pemerintah Daerah

- Penyiaran Strategis (visi dan misi)

Mampu Menerjemahkan visi dan misi setrategis pemerintah daerah yang ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam sasaran operasional yang terukur.

- Pengukuran kinerja yang komprehensif

BSC Menggeser fokus dari sekedar penerapan anggaran ke pengukuran seimbang, termasuk kepuasan masyarakat.

- Peningkatan Pelayanan Publik

dalam BSC, masyarakat memiliki perspektif memaksa aparatur pemerintah daerah untuk lebih fokus pada kualitas layanan, transparansi, dan kepuasan manfaat layanan publik.

- Akuntabilitas yang lebih baik

Dengan indikator yang jelas di keempat perspektif, pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam melaporkan kinerja (LAKIP) dan tanggung jawab pada penggunaan dana publik.

2) Permasalahan dalam Pengaplikasian

- Perubahan Perspektif (Adaptasi)

BSC sektor publik berbeda dengan swasta, jadi keuangan tidak bisa menjadi tujuan utama, melainkan pendorong. Perspektif pelanggan (masyarakat) lebih rumit karena pelanggan pemerintah sangat beragam dan sering tidak bersifat sukarela.

- Penerapan Indikator Kinerja (KPI) Kualitatif

Banyak program pemerintah yang bersifat intangible (tidak berwujud), setiap peningkatan kesejahteraan atau efektivitas hukum, sehingga sulit menetapkan tolak ukur kinerja yang kuantitatif, objektif, dan dapat diukur secara presisi.

- Kapasitas SDM dan Keterbatasan Teknologi

Pengaplikasian BSC memerlukan pemahaman komprehensif dalam manajemen setrategis.

Terbatasnya SDM di daerah bisa menjadi kendala.

- Budaya Organisasi

Pergeseran dari input (anggaran) ke output dan outcome (hasil) memerlukan budaya organisasi yang fundamental. Pemda lebih fokus pada penyerapan anggaran serasa prosedural daripada efektivitas hasil akhir.

2. Analisislah Key Success Factor pada organisasi pemerintah daerah, setelah itu tentukan Key Performance Indicator-nya!

1) Key Success Factor (KSF)

- Kualitas Pelayanan publik
- Pengelolaan keuangan yang transparan
- Respons Cepat terhadap kebutuhan masyarakat
- SDM yang kompeten
- Pengawasan dan Pengendalian Internal yang baik

2) Key Performance Indicator (KPI)

Keuangan

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penurunan temuan audit BPK

3) Value for Money

- Rasio efektivitas anggaran

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

- Rasio efisiensi anggaran

$$\frac{\text{Biaya}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Output

- Penurunan angka kemiskinan / pengangguran

4) Pelayanan Publik

- Persentase penyelesaian keluhan masyarakat
- Waktu respons pelayanan publik

3. Diskusikan bagaimana menciptakan sistem manajemen kompensasi yang dapat mendorong kinerja unit kerja pemerintah!

- Kompensasi harus berbasis kinerja, bukan hanya masa kerja.
- Pemberian insentif berdasarkan pencapaian target unit kerja
- Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan transparan.
- Adanya reward dan punishment agar pegawai lebih termotivasi.
- Sistem kompensasi harus adil sesuai beban kerja dan tanggung jawab.

4. Jelaskan strategi implementasi pengukuran kinerja Value for Money!

- Menetapkan tujuan dan target program secara jelas
- Mengukur aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas
- Membandingkan input, output dan outcome program.
- Menggunakan indikator kinerja yang terukur relevan.

- Melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap penggunaan anggaran.

5. Jelaskan faktor - faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja!

- Indikator harus relevan dengan tujuan organisasi

- Maudan dipahami dan diukur.

- Memiliki data yang tersedia dan akurat

- Dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

- Bersifat objektif realistis dan konsisten.

- Mampu menunjukkan keberhasilan program pemerintahan.